Pemberesan Boedel Pailit melalui *Going Concern* oleh Kurator Dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan

Jafra Luthfi Azhari, Yeti Sumiyati
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
jafraluthfi19@gmail.com

Abstract—The Bankruptcy Law states that a company declared bankrupt by the court will lose the right to control the company's assets. The curator is the only party authorized to take over to settle the bankruptcy estate. The Bankruptcy Law provides an opportunity for curators to undertake a going concern, with the aim of increasing bankruptcy assets so as to fulfill debtors' obligations to their creditors. The problems in this research are: Are the laws and regulations sufficient to regulate bankruptcy settlement through a going concern? Researchers used a normative juridical approach, analytical descriptive research specifications, data collection techniques were literature studies, and the analysis method used was qualitative juridical. The case study in this research is PT. Panghegar Kana Legacy. The result of the research is that the Bankruptcy Law provides an explanation of going concern only in general terms and not specifically, because in the General Explanation the so-called Business Continuity Principle is a provision that allows prospective debtor companies to continue. This shows the absence of a clear measure of how prospective the company is.

Keywords—*Bankruptcy, Going Concern, Bankruptcy Property*

Abstrak—Undang-Undang Kepailitan, menyatakan bahwa suatu perseroan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, akan kehilangan hak untuk menguasai harta kekayaan perseroan tersebut. Kurator satu-satunya pihak yang berwenang mengambil alih untuk melakukan pemberesan harta pailit tersebut. Undang-Undang Kepailitan memberikan peluang kepada Kurator untuk melakukan *going concern*, dengan tujuan dapat meningkatkan harta pailit sehingga dapat memenuhi kewajiban debitur terhadap para krediturnya. Permasalahan pada penelitian ini yaitu: Apakah peraturan perundang-undangan cukup memadai mengatur tentang pemberesan boedel pailit melalui *going concern*?. Peneliti menggunakan metodologi pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, serta metode analisis yang digunakan berupa yuridis kualitatif. Studi kasus pada penelitian ini adalah PT. Panghegar Kana Legacy. Hasil dari penelitian adalah Undang-undang Kepailitan memberikan penjelasan mengenai *going concern* hanya secara umum dan belum secara spesifik, karena pada Penjelasan Umum yang

disebut dengan Asas Kelangsungan Usaha yakni ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya ukuran yang jelas bagaimana perusahaan yang prospektif tersebut.

Kata Kunci—*pailit, Going Concern, Harta Pailit*

I. PENDAHULUAN

Salah satu dasar penilaian prestasi suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nilai perusahaan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan. Penerapan untuk tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas laba dengan memperhatikan kepentingan stakeholders yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Good corporate governance (selanjutnya disebut GCG) didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Manfaat dari pelaksanaan GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Dalam kondisi normal, untuk melakukan pengelolaan perusahaan bukan merupakan hal yang mudah, sangat bergantung kepada direksi yang mempunyai pengalaman serta memiliki *skill* yang mumpuni. Apalagi, ketika perusahaan sudah diputus pailit diharuskannya untuk dilakukan pengelolaan, dalam hal ini pihak yang berwenang melakukan pengelolaan perusahaan tersebut adalah Kurator. Maka menjadi sebuah tantangan bagi kurator didalam melakukan pengelolaan perusahaan yang memiliki budaya serta karakter tersendiri, serta dengan status yang sudah dipailitkan. Kurator dalam melakukan pengelolaan perusahaan tersebut tentunya harus merujuk pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik/GCG agar

dapat meningkatkan nilai boedel pailit serta dapat terpenuhinya hak-hak kreditur dan kepentingan perusahaan.

Dalam keadaan perusahaan pailit, dimana segala kepentingan harus dipenuhi, maka langkah *going concern* dapat dilakukan. Para ahli pada umumnya berpendapat bahwa keadaan *going concern* dalam praktik bisnis digunakan sebagai parameter dalam memperkirakan kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 (satu) tahun ke depan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK-PKPU) mengatur mengenai *Going Concern* tetapi hanya secara umum dan tidak mengatur secara teknis, dalam praktik pengurusan dan pemberesan harta pailit, keadaan *going concern* dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menentukan pilihan untuk melikuidasi jika harta pailit debitur telah insolven.

Kurator sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengambil alih harta dan boedel pailit perusahaan, Kurator harus memiliki kemampuan manajemen untuk mengkomersialisasikan aset yang dimiliki, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam hal ini *going concern* dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai boedel untuk memenuhi kewajiban-kewajiban debitur terhadap hak-hak kreditur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Apakah peraturan perundang-undangan cukup memadai mengatur tentang pemberesan boedel pailit melalui *going concern* pada kepailitan PT. Panghegar Kana Legacy?". Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *going concern* pada kepailitan PT. Panghegar Kana Legacy.

II. LANDASAN TEORI

Kepailitan merupakan akibat hukum dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang merupakan salah satu landasan Undang-undang Kepailitan. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." Menurut Bagus Irawan (2007:15) Argumentasi terhadap landasan tersebut, mengindikasikan bahwa harta kekayaan yang saat ini serta harta kekayaan yang mungkin nantinya ada yang dimiliki oleh debitur merupakan jaminan terhadap seluruh utang-utangnya.

Akibat hukum dari suatu kepailitan yakni kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala "hak perdata" untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUK-PKPU, menyatakan bahwa "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan

pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini".

Menurut Rahayu Hartini (2007:4), Kata Pailit berasal dari bahasa Perancis "*failite*" yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*failliet*". Sedangkan dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.

Menurut R. Surayatin (1983:264), didalam Penjelasan Umum (*Memorie Van Toelichting*), Kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan. Menurut Fred B.G. Tumbuan (2001:125), Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua Kreditornya.

Menurut Saleh Adiwinata (1983:34), Dalam kamus hukum *Fockema Andreae* disebutkan, kepailitan seorang debitur adalah keadaan yang ditetapkan oleh Pengadilan bahwa debitur telah berhenti membayar utang-utangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan dan pendapatannya demi kepentingan semua kreditur di bawah pengawasan Pengadilan.

Menurut Adrian Sutedi (2009:10), Tujuan utama kepailitan yaitu membagi harta debitur pailit kepada para kreditornya yang dilakukan oleh kurator setelah adanya putusan pailit. Untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah yang dilakukan oleh kreditor, maka kepailitan merupakan proses yang dapat mengganti sitaan terpisah tersebut menjadi sitaan bersama sehingga harta kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.

Fungsi kepailitan menurut Harold F. Lusk (1974:1076) yaitu: (1) untuk melindungi kreditor satu sama lain, (2) melindungi kreditor dari debiturnya, dan (3) melindungi debitur yang jujur dari kreditornya. Untuk mencapai tujuan tersebut, debitur diwajibkan untuk mengungkapkan semua hartanya dan menyerahkannya kepada Kurator. Ketentuan tersebut dibuat untuk pemeriksaan debitur dan hukuman bagi debitur yang menolak untuk mengungkapkan dan menyerahkan hartanya secara jujur. Kurator dari harta pailit mengelola, melikuidasi, dan mendistribusikan prosedur harta pailit tersebut kepada kreditor. Jika debitur jujur dalam melakukan proses kepailitan, maka ia dijamin akan bebas dari kepailitan

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Tentang *Going Concern* Pada Kepailitan PT. Panghegar Kana Legacy.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *going concern* pada kepailitan PT. Panghegar Kana Legacy adalah Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut digunakan karena memiliki keterkaitan

dengan tugas dan kewenangan Kurator yang menggantikan debitur pailit dalam melakukan *going concern* pada PT. Panghegar Kana Legacy.

PT Panghegar Kana Legacy memiliki total utang Rp. 622.008.630.503,06 kepada 154 kreditur, terdiri dari Kreditur Konkuren sejumlah 153 kreditur, dan Kreditur Separatis sejumlah 1 kreditur. Sedangkan jumlah aset yang tersedia sebagaimana tercatat dalam Pertelaan Aset PT Panghegar Kana Legacy terutama hanya meliputi aset tanah dan bangunan hotel/kondotel seluas 6000 m² (proyek Dago) dan aset tanah kosong di pantai Uluwatu Bali seluas 3,9 Ha (proyek Uluwatu), kedua aset tersebut nilainya tidak dapat memenuhi kebutuhan penyelesaian utang Debitur, apalagi tidak ada aset lainnya yang signifikan yang dapat menutupi nilai tagihan dari seluruh Krediturnya.

Berdasarkan Putusan Pailit pada tanggal 28 April 2016, PT. Panghegar Kana Legacy sudah tidak mempunyai kewenangan melakukan pengurusan terhadap setiap dan semua harta kekayaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) *jo.* Pasal 24 ayat (1) *jo.* Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU. Oleh karena itu, Kurator merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengambil alih kewenangan debitur dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan harta pailit.

Putusan Pernyataan Pailit PT. Panghegar Kana Legacy akibat dari ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan debitur dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka debitur serta merta berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 292 dan Penjelasan Pasal 292 UUK-PKPU. Debitur yang berada dalam keadaan insolvensi, maka Kurator harus segera melakukan pemberesan atau menjual semua harta pailit tanpa persetujuan debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) UUK-PKPU.

Pasal 178-179 UUK-PKPU, pada intinya mengatakan bahwa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, apabila ketika dalam rapat pencocokan piutang rencana perdamaian tidak ditawarkan atau rencana perdamaian yang di tawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak. Namun dalam rapat tersebut Kurator atau kreditur yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan untuk melanjutkan perusahaan debitur pailit tersebut.

Pada Pasal 104 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU, pada intinya mengatakan bahwa ketika usaha debitur sudah dinyatakan pailit, maka undang-undang Kepailitan masih memberikan peluang bagi Kurator untuk *going concern*/melanjutkan usaha debitur pailit tersebut. *Going concern* dapat dilakukan oleh Kurator dalam dua fase. Pertama, pada saat sebelum atau pada saat dilaksanakannya rapat pencocokan piutang apabila debitur tidak mengajukan rencana perdamaian. Kedua, pada saat setelah pencocokan piutang atau apabila rencana perdamaian tidak diterima atau perdamaian tidak tercapai, maka pengusulan ini sudah termasuk kedalam tahap

insolvensi (Pasal 178 UUK-PKPU).

Pertimbangan untuk melakukan *going concern* yakni dilihat dari penilaian secara ekonomis/*economic value* terhadap suatu perusahaan pailit tersebut, yang mana pengusulan untuk melakukan *going concern* dilihat ketika prospek suatu perusahaan dinilai dapat lebih baik untuk dilanjutkan dibandingkan dengan hanya menilai aset fisik dari perusahaan tersebut.

Tugas utama Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 69 UUK-PKPU), dimana pengurusan harta pailit dilaksanakan sejak putusan pailit sampai dengan pembahasan rencana perdamaian (sebelum insolvensi) (Pasal 147 UUK-PKPU). sedangkan pemberesan dilaksanakan pada saat debitur berada dalam keadaan insolvensi.

Berkaitan dengan pemberesan harta pailit, terdapat dua kemungkinan untuk memaksimalkan pemberesan tersebut. Kemungkinan yang pertama yaitu melakukan penjualan harta pailit, peran Kurator dalam menilai apakah biaya yang diperlukan debitur untuk melanjutkan usaha terlalu besar dari pada keuntungan yang akan didapat. Sedangkan untuk kemungkinan yang kedua yaitu melanjutkan usaha debitur atau *going concern*, yang mana tindakan ini dilakukan oleh Kurator apabila terdapat kemungkinan bahwa harta pailit dapat meningkat. Tentunya untuk melanjutkan usaha debitur, Kurator harus meminta persetujuan para kreditur dan Hakim Pengawas.

Pada Undang-undang Kepailitan memberikan penjelasan mengenai *going concern*/Kelangsungan usaha hanya secara umum dan belum secara spesifik, karena belum secara jelas mengatur yang berkaitan dengan; bagaimana *going concern* itu sebaiknya dilakukan, serta ukuran untuk menentukan bahwa *going concern* itu dapat diterapkan pada suatu perseroan yang seperti apa. Karena pada Penjelasan Umum Undang-undang Kepailitan yang disebut dengan Asas Kelangsungan Usaha yakni ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

Hal tersebut menunjukkan tidak adanya ukuran yang jelas bagaimana perusahaan yang prospektif tersebut, apakah harus dilakukan oleh auditor untuk menilai laporan keuangan suatu perusahaan agar dapat menentukan perusahaan tersebut dapat menerapkan *going concern* atau tidak, atau cukup dengan Kurator yang menilai secara riil mengenai harta pailit yang tidak cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban debitur terhadap para kreditur nya. Sebagaimana yang diterapkan oleh Kurator pada PT. Panghegar Kana Legacy yang menerapkan *going concern* tersebut berdasarkan penilaian secara riil/ apa adanya terhadap harta pailit yang dimiliki oleh PT. Panghegar Kana Legacy.

Perseroan Terbatas yang oleh undang-undang diberi status badan hukum (Pasal 1 ayat (1) *jo* Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) adalah subjek hukum mandiri atau *persona standi in judicio*, Akan tetapi, berbeda dengan orang perseorangan (manusia), oleh karena Perseroan, sekalipun

merupakan subyek hukum mandiri, adalah suatu “*artificial person*”, Perseroan hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia selaku wakilnya. Yang mana kenyataan ini sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam UUPT yang menegaskan bahwa kepengurusan Perseroan dilakukan oleh Direksi dan bahwa Direksi yang diberi tugas dan wewenang untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 98 ayat (1) UUPT).

Perseroan yang dinyatakan pailit adalah disebut debitur pailit sebagaimana dimaksud dalam UUK-PKPU. Perseroan pailit tersebut diperlakukan sama seperti orang perseorangan yang dinyatakan pailit. Kepailitan hanya mencakup harta kekayaannya. Perseroan pailit tetap cakap melakukan perbuatan hukum, akan tetapi tidak berwenang untuk mengurus dan mengalihkan serta mengikat kekayaannya yang tercakup dalam harta pailit untuk utang yang terjadi setelah pernyataan pailit (Pasal 25 UUK-PKPU). Kewenangan dimaksud ada pada Kurator secara eksklusif.

Dengan kewenangan eksklusif Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit baik yang ada pada saat putusan pailit maupun yang akan ada kemudian, maka kurator berhak meminta organ perseroan khususnya direksi untuk menyerahkan semua informasi, data dan dokumen terkait harta pailit kepada kepada Kurator.

Menurut hemat saya direksi, komisaris, pemegang saham, dan RUPS dalam proses *going concern* masih mempunyai eksistensi akan tetapi sepanjang tidak berkaitan dengan pengurusan dan perbuatan pemilikan harta atau aset perseroan terbatas. Karena yang berhak dalam pengurusan dan perbuatan pemilikan harta atau aset perseroan terbatas adalah Kurator. Maka Kurator dalam melaksanakan *going concern* juga merujuk pada prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Serta harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam melakukan tugas nya ketika melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Pemberian Tugas dan wewenang oleh UUK-PKPU kepada kurator dalam kepailitan, terutama adalah untuk semaksimal mungkin dapat meningkat nilai harta pailit dan tentunya bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian harta pailit (tanggung jawab Kurator, Pasal 69 - Pasal 78 UUK-PKPU), demikian pula dengan Kurator PT. Panghegar Kana Legacy sebagaimana ketentuan tersebut di atas juga berkewajiban untuk meningkatkan harta pailit.

Berkaitan dengan harta PT. Panghegar Kana Legacy yang termasuk kedalam harta pailit perseroan, maka Kurator wajib sejak awal melakukan pencatatan harta perseroan dengan persetujuan Hakim Pengawas, kemudian pencatatan dituangkan dalam bentuk “Pertelaan Aset Harta Pailit PT. Panghegar Kana Legacy”. Kurator dengan kewenangan eksklusif nya dapat meminta perseroan khususnya direksi untuk menyerahkan semua informasi, data dan dokumen yang berkaitan dengan harta pailit

perseroan.

Pertimbangan utama Kurator mengambil langkah mengajukan usulan untuk melanjutkan usaha debitur adalah untuk meningkatkan harta pailit, karena berdasarkan pertelaan harta pailit, PT. Panghegar Kana Legacy memiliki aset berupa tanah dan bangunan atau kondotel yang masih dalam proses pembangunan sekitar 60% dari target penyelesaian. Langkah *going concern* juga didukung oleh mayoritas Kreditur PT. Panghegar Kana Legacy, terutama para pembeli unit kondotel yang tetap menginginkan memiliki kondotel tersebut, yang disampaikan pada rapat rapat kreditur yang diselenggarakan oleh Kurator baik rapat-rapat di Pengadilan maupun di luar pengadilan.

ketika Kurator melakukan penilaian atas harta pailit PT. Panghegar Kana Legacy, apa adanya (*as is*) dalam bentuk bangunan yang masih dalam proses pembangunan sekitar 60%, maka nilainya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah tagihan kreditur sebagaimana yang ditetapkan dalam Daftar Tagihan yang diakui Kurator, sehingga apabila dilakukan proses pemberesan harta pailit yang apa adanya (*as is*) melalui proses jual lelang, akan berakibat rendah terhadap skema penyelesaian pembayaran tagihan masing-masing kreditur.

Dengan tindakan Kurator yang melaksanakan *going concern* dinilai cukup efektif, karena diketahui dari perbandingan skema penyelesaian pembayaran tagihan dari masing-masing kreditur, yaitu dengan menerapkan *going concern* skema penyelesaian pembayaran tagihan kreditur lebih dari 40% serta mendapatkan kepemilikan atas unit kondotel. Sedangkan dengan tidak menerapkan *going concern* skema penyelesaian pembayaran kepada kreditur hanya berkisar 10% - 20% dari nilai tagihan.

Dengan kata lain, pelaksanaan *going concern* yang dilakukan oleh Kurator pada PT. Panghegar Kana Legacy dapat dinilai lebih efektif dibandingkan apabila Kurator melakukan pemberesan dengan menjual seluruh harta pailit yang tidak akan cukup untuk menutupi seluruh kewajiban debitur terhadap kreditur nya. Dengan penerapan *going concern*, maka keefektifitasannya dapat dibuktikan dengan meningkatnya skema penyelesaian pembayaran tagihan kepada kreditur PT. Panghegar Kana Legacy..

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 104 ayat (1) dan (2), yang mengatakan bahwa ketika usaha debitur sudah dinyatakan pailit, maka UUK-PKPU masih memberikan peluang bagi Kurator untuk melakukan *going concern*/melanjutkan usaha debitur pailit tersebut. *Going concern* dapat diajukan oleh Kurator dalam dua fase. Pertama, pada saat sebelum atau pada saat dilaksanakannya rapat pencocokan piutang apabila debitur tidak mengajukan rencana perdamaian. Kedua, pada saat setelah pencocokan piutang atau apabila rencana perdamaian tidak diterima atau perdamaian tidak

tercapai, maka pengusulan ini sudah termasuk kedalam tahap insolvensi. Pelaksanaan *going concern* yang dilakukan oleh Kurator pada PT. Panghegar Kana Legacy dinilai lebih efektif dibandingkan apabila Kurator melakukan pemberesan dengan menjual seluruh harta pailit yang tidak akan cukup untuk menutupi seluruh kewajiban debitur terhadap kreditur nya. Dengan penerapan *going concern*, maka keefektivasannya dapat dibuktikan dengan meningkatnya skema penyelesaian pembayaran tagihan kepada para kreditur PT. Panghegar Kana Legacy.

V. SARAN

A. Saran Teoritis

Hendaknya penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan membahas mengenai efektivitas penerapan *going concern* pada perusahaan yang sudah dinyatakan pailit

B. Saran Praktis

Kepada Pemerintah dan pembuat undang-undang agar kedepannya dapat memberikan rumusan yang lebih spesifik terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai Asas Kelangsungan Usaha, sehingga dalam pelaksanaan *going concern* betul-betul dapat terlaksana secara efektif, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai ukuran yang jelas tentang usaha suatu perusahaan yang prospektif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Gozali, N. 2013. Dampak Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(4).
- [2] Elyta Ras Ginting. 2018. *Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [3] Bagus Irawan, 2007. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perseroan dan Asuransi*, Bandung, Alumni.
- [4] Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, 2007. Malang:UMM Press.
- [5] R. Surayatin, 1983. "*Hukum dagang I, dan IP*", Jakarta: Pradnya Paramita.
- [6] Adrian Sutedi, 2009. *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- [7] Saleh Adwinata, 1983. dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrae*, Edisi Bahasa Indonesia, Bandung: Binacipta.
- [8] Lusk, H. F., Hewitt, C. M., Donnell, J. D., & Barnes, A. J. 1974. *Business Law-Principles and Cases*. Richard D. Irwin. *Inc., Homewood, Illinois*, 517.
- [9] Hanan Asla, Yeti Sumiyati, 2018. Kedudukan Kantor Pajak Sebagai Kreditor Preferen dalam Rapat Kreditor Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Property yang menimbulkan Kepailitan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Vol.4, No.1.